

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SUKABUMI MENURUT PENGELUARAN

*Gross Regional Domestic Product of
Sukabumi Regency
by Expenditure*

2018 - 2022



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SUKABUMI MENURUT PENGELUARAN

*Gross Regional Domestic Product of
Sukabumi Regency
by Expenditure*

2018 - 2022



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SUKABUMI MENURUT PENGELUARAN 2018 - 2022

ISBN : 2798-7744
Nomor Publikasi : 32020.2305
Katalog : 9302023.3202

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 84 halaman

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Desain Kover:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh:
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi

Dicetak oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi

Tim Penyusun

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUKABUMI
MENURUT PENGELUARAN 2018 - 2022**

Penanggung Jawab Umum:
Saman, S.Si

Penanggung Jawab Teknis:
Anwar Hidayat, S.Si

Editor:
Anwar Hidayat, S.Si

Penulis dan Pengolahan Data:
Siti Khoerunnisa Alislami Assaniah, SST

Desain/Lay out:
Siti Khoerunnisa Alislami Assaniah, SST

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

<https://sukabumikab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam hal ini Kabupaten Sukabumi. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Sukabumi, April 2022

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sukabumi,**



Saman, S.Si

<https://sukabumikab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL.....	IX
DAFTAR LAMPIRAN.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	3
1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB	7
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	13
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)	15
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT).....	17
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)	20
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	23
2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI).....	26
2.6 EKSPOR - IMPOR	30
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SUKABUMI MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2018 -2022.....	33
3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN.....	35
3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN.....	45
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga.....	45
3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT	49
3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah	50
3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	53
3.2.5. Perubahan Inventori.....	54

	3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa	56
	3.2.7. Impor Barang dan Jasa	57
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN SUKABUMI, 2018 - 2022	59
	4.1 PDRB (NOMINAL).....	61
	4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB..	62
BAB V	PENUTUP	65
LAMPIRAN	69
DAFTAR PUSTAKA	81

<https://sukabumikab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

TABEL 1	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKABUMI, 2018 - 2022	36
TABEL 2	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKABUMI, 2018 - 2022	38
TABEL 3	DISTRIBUSI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKABUMI, 2018 - 2022.....	40
TABEL 4	LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKABUMI, 2018 - 2022	43
TABEL 5	INDEKS IMPLISIT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKABUMI, 2018 - 2022	44
TABEL 6	SUMBER PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKABUMI, 2018 - 2022	44
TABEL 7	PERKEMBANGAN KOMPONEN KONSUMSI RUMAH TANGGA KABUPATEN SUKABUMI, 2018 – 2022.....	47
TABEL 8	STRUKTUR KOMPONEN KONSUMSI RUMAH TANGGA KABUPATEN SUKABUMI, 2018—2022.....	48
TABEL 9	PERKEMBANGAN PENGELUARAN AKHIR KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA KABUPATEN SUKABUMI, 2018 – 2022.....	49
TABEL 10	PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI, 2018 – 2022.....	51
TABEL 11	PERKEMBANGAN DAN STRUKTUR PMTB KABUPATEN SUKABUMI, 2018 - 2022	54
TABEL 12	PERKEMBANGAN DAN STRUKTUR PERUBAHAN INVENTORI KABUPATEN SUKABUMI, 2018—2022.....	55
TABEL 13	PERKEMBANGAN NET EKSPOR KABUPATEN SUKABUMI, 2018 – 2022	56

TABEL 14	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PDRB PERKAPITA KABUPATEN SUKABUMI, 2018 – 2022.....	62
TABEL 15	PROPORSI TOTAL PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB KABUPATEN SUKABUMI, 2018-2022	63

<https://sukabumikab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

TABEL 1	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKABUMI, 2018 – 2022	71
TABEL 2	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKABUMI, 2018 – 2022	72
TABEL 3	DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKABUMI, 2018 – 2022	73
TABEL 4	DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKABUMI, 2018 – 2022	74
TABEL 5	LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKABUMI, 2018 -2022	75
TABEL 6	LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKABUMI, 2018 – 2022	76
TABEL 7	INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKABUMI, 2018 - 2022	77
TABEL 8	INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN SUKABUMI, 2018 – 2022	78
TABEL 9	INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (2010=100) MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN SUKABUMI, 2018 – 2022	79

TABEL 10	LAJU PERTUMBUHAN INDEKS HARGA IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (2010=100) MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN SUKABUMI, 2018 – 2022	80
----------	---	----

<https://sukabumikab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

<https://sukabumikab.bps.go.id>

<https://sukabumikab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

“output akhir (*final output*)”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb:

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>) Tetap Bruto	= Pembentukan Modal
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam

bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi

maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan

tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
- Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda *FISIM* (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge* (*IBSC*).

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

BAB II
METODA ESTIMASI
DAN SUMBER DATA

<https://sukabumikab.bps.go.id>

<https://sukabumikab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)

- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. **Metoda Estimasi**

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah.

Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan

- dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
 - c. Penyusutan
 - d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);

6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan:

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian

barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

**PK-P atas dasar harga Berlaku = Output - Penjualan barang dan jasa +
Social transfer in kind purchased market
production + Output Bank Indonesia**

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan:

Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan

PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar,

transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate*

PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang \times Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) \times Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam

proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;

- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;

6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) × Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan × IHPB rata-rata (t)

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://sukabumikab.bps.go.id>

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN SUKABUMI
MENURUT PDRB PENGELUARAN
TAHUN 2018 -2022

<https://sukabumikab.bps.go.id>

<https://sukabumikab.bps.go.id>

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Sukabumi atas dasar harga berlaku di tahun 2022 kenaikan sebesar 7,78%, yakni dari 70,74 triliun rupiah (2010=100) pada tahun 2021 menjadi 76,24 triliun rupiah (2010=100). Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, PDRB Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan juga yakni dari 47,94 triliun rupiah (2010=100) menjadi 50,39 triliun rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 5,12%.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang merangkak naik, perekonomian Kabupaten Sukabumi periode 2018 - 2022 sempat melemah di tahun 2020 namun berhasil naik pada tahun 2021, yakni sebesar 5,81%; 5,64%; -0,91%; 3,74%; dan 5,12%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 10,10% setiap tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Namun, karena pandemi melanda Indonesia, pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Sukabumi mengalami kontraksi ekonomi sebesar 0,91%.

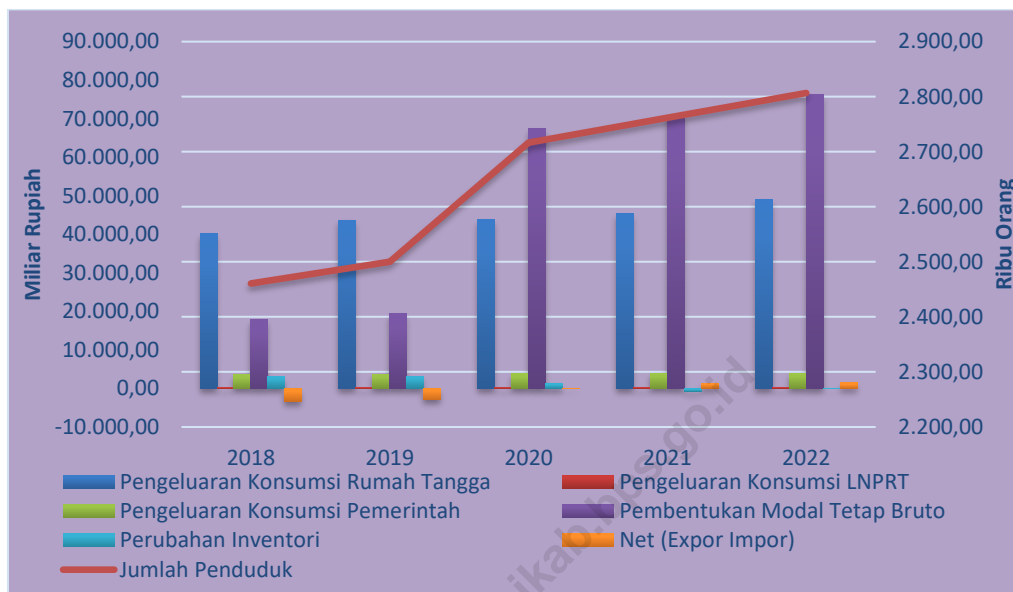
Pada periode tahun 2018 - 2022 PDRB Kabupaten Sukabumi atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan meskipun sempat mengalami resesi tahun 2020 karena pandemi, yakni sebesar 61,61 triliun rupiah (2018); 67,42 triliun rupiah (2019); 67,46 triliun rupiah (2020); 70,74 triliun rupiah (2021); dan 76,24 triliun rupiah (2022). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Perkembangan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Sukabumi pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022

(Miliar Rp/Trillion Rp)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	40.096,23	43.713,67	43.796,96	45.358,29	49.039,08
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	327,67	348,71	342,66	353,61	378,12
3. Konsumsi Pemerintah	3.596,57	3.752,25	3.796,87	3.968,80	4.001,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	17.869,75	19.345,66	18.159,55	20.347,08	21.272,68
5. Perubahan Inventori	3.152,18	3.217,40	1.292,22	-702,07	118,19
6. Net Ekspor	-3.427,62	-2.954,57	73,92	1.412,33	1.434,56
PDRB / GRDP	61.614,78	67.423,12	67.462,17	70.738,04	76.243,67

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dinilai dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Sukabumi pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

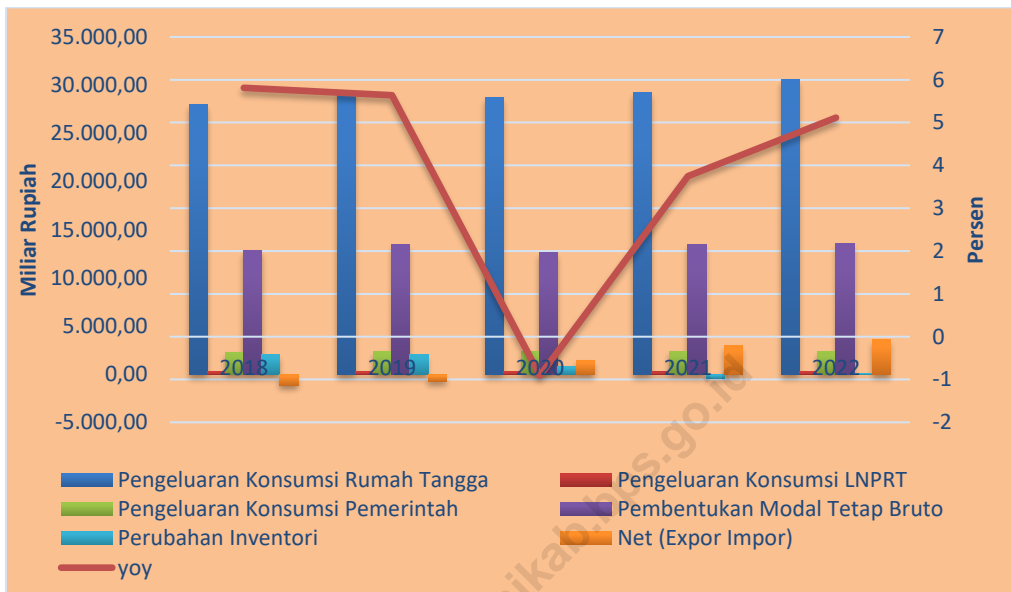
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022

(Miliar Rp/Trillion Rp)

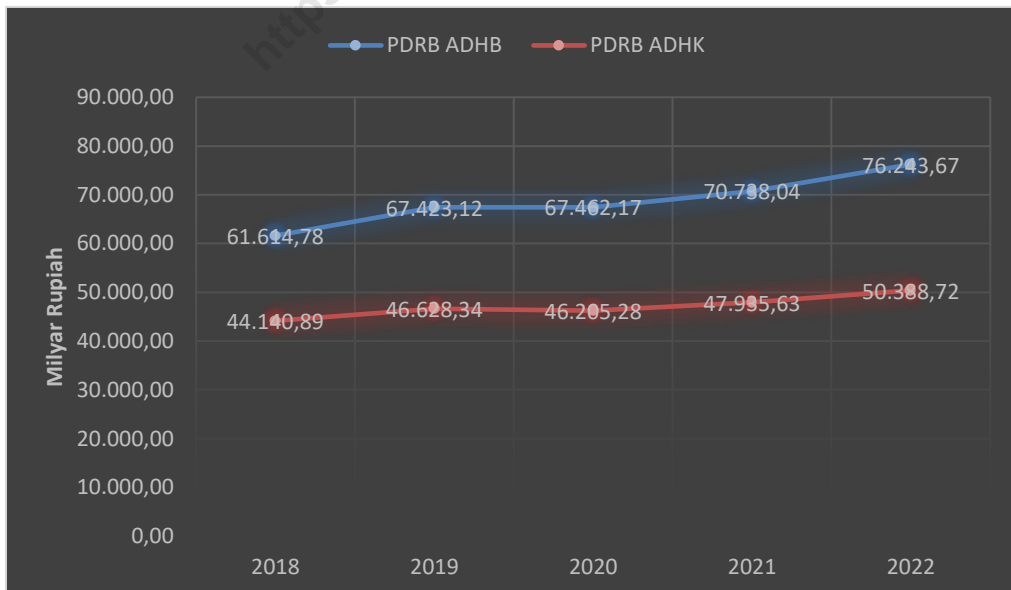
Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	27.945,39	29.265,68	28.768,02	29.253,68	30.580,38
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	231,82	240,65	231,89	236,47	246,75
3. Konsumsi Pemerintah	2.261,44	2.338,67	2.341,29	2.400,87	2.366,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	12.817,01	13.464,78	12.590,38	13.471,70	13.561,34
5. Perubahan Inventori	2.033,63	2.039,80	816,59	-416,35	69,87
6. Net Ekspor	-1.148,41	-721,26	1.457,11	2.989,26	3.563,63
PDRB / GRDP	44.140,89	46.628,34	46.205,28	47.935,63	50.388,72

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Sukabumi tahun 2018 - 2019 meningkat, yakni sebesar 44,14 triliun rupiah (2018) menjadi 46,63 triliun rupiah (2019). Pada tahun berikutnya, PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Sukabumi menurun menjadi 46,21 triliun rupiah. Di tahun 2021 dan 2022, PDRB Kabupaten Sukabumi atas dasar harga konstan mengalami kenaikan menjadi 47,94 triliun rupiah dan 50,39 triliun rupiah. Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukabumi berfluktuatif, yakni dari 5,81 persen pada tahun 2018 menjadi 5,12 persen pada tahun 2022.

Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022



Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022



Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. PDRB Kabupaten Sukabumi atas dasar harga berlaku selalu mengalami kenaikan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami penurunan pada tahun 2020.

Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022

(%)					
Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	65,08	64,83	64,92	64,12	64,32
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50
3. Konsumsi Pemerintah	5,84	5,57	5,63	5,61	5,25
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,00	28,69	26,92	28,76	27,90
5. Perubahan Inventori	5,12	4,77	1,92	-0,99	0,16
6. Nett Ekspor	-5,56	-4,38	0,11	2,00	1,88
PDRB / GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

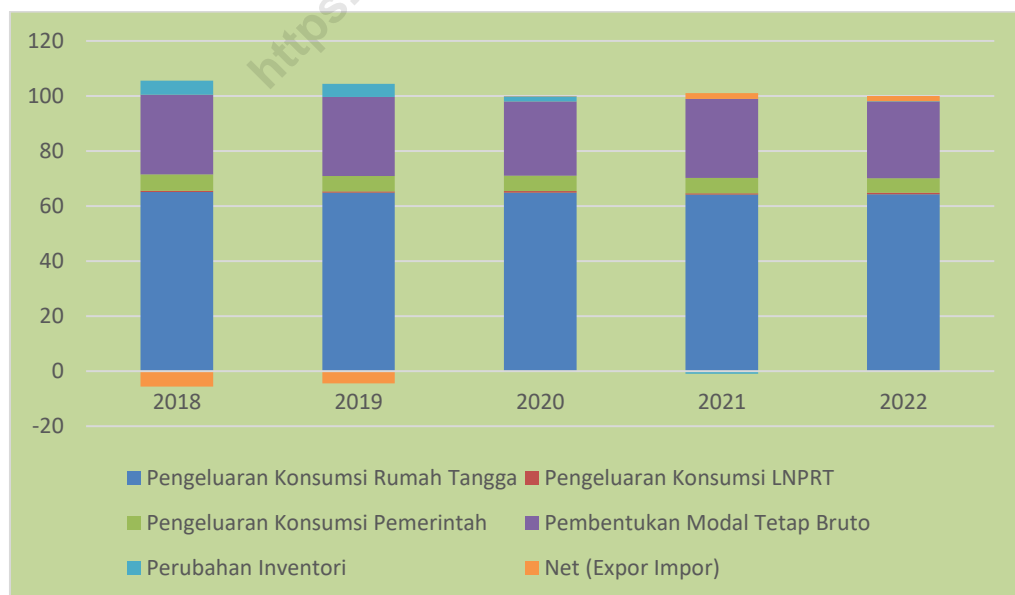
Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2018-2022, PDRB Kabupaten Sukabumi, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 27 sampai dengan 28 persen.

Kabupaten Sukabumi memiliki industri dalam skala besar yang cukup banyak, maka ketergantungan terhadap barang impor dari luar kabupaten juga sangat tinggi. Bila dilihat dari angkanya maka Kabupaten Sukabumi masih termasuk dalam kabupaten dengan kategori net impor, artinya impornya selalu lebih besar dari ekspornya pada periode 2018 dan 2019. Namun, pada tahun berikutnya nilai ekspor lebih besar dari impor.

Dominasi hasil perekonomian primer (terutama pertanian) dalam hal jumlah, cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal dan di ekspor ke wilayah Jawa Barat, sementara barang hasil industri masih sebagian besar impor dari kabupaten lainnya di Jawa Barat.

Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022



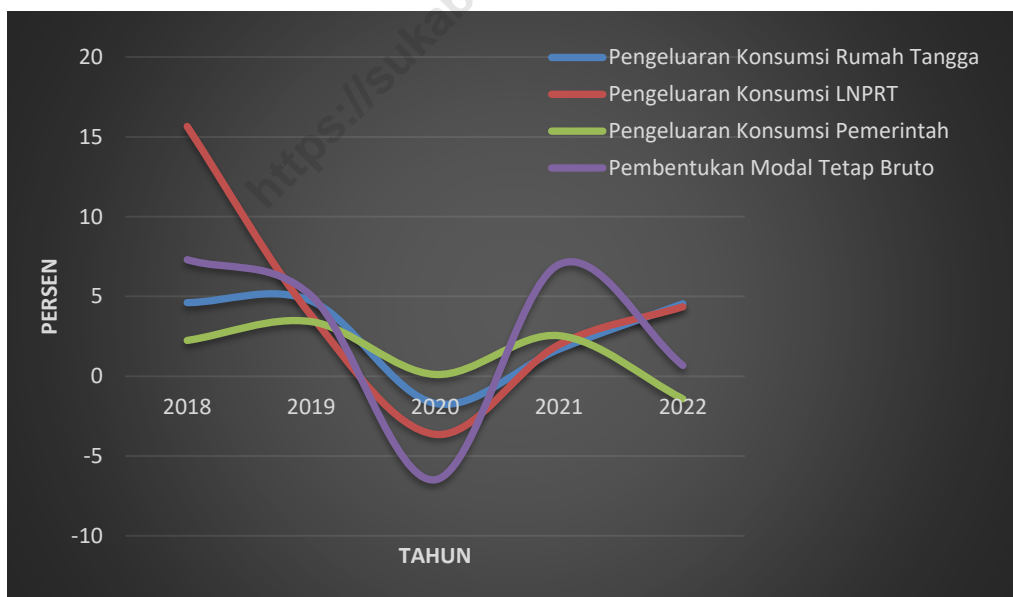
Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 5,25 - 5,84 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa produktifitas penduduk Kabupaten Sukabumi sebagian besar masih sekedar cukup untuk konsumsi rumah tangga. Sementara untuk konsumsi lainnya masih bergantung barang produksi dari kabupaten lainnya. Sehingga pada periode 2018-2019 selisih perdagangan/ ekspor dan impor di Kabupaten Sukabumi selalu dalam kondisi “defisit”. Walaupun ada perusahaan industri besar di wilayah Kabupaten Sukabumi, tetapi sebagian besar bahan bakunya masih mengandalkan impor dari luar. Di kabupaten ini hanya ada jasa pembuatan menjadi barang jadi, sehingga semakin memperjelas kondisi “defisit” tersebut.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2018 - 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi berfluktuatif, yakni sebesar 5,81 persen (2018); 5,64 persen (2019); -0,91 persen (2020); 3,74 persen (2021); dan 5,12 persen (2022). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022

(%)					
Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,61	4,72	-1,70	1,69	4,54
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	15,65	3,81	-3,64	1,97	4,35
3. Konsumsi Pemerintah	2,24	3,42	0,11	2,54	-1,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,30	5,05	-6,49	7,00	0,67
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor					
PDRB / GRDP	5,81	5,64	-0,91	3,74	5,12

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022



Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT,

⁶ Indeks perkembangan

pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2018 - 2022, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	143,48	149,37	152,24	155,05	160,36
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	141,35	144,90	147,77	149,54	153,24
3. Konsumsi Pemerintah	159,04	160,44	162,17	165,31	169,05
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	139,42	143,68	144,23	151,04	156,86
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor					
PDRB / GRDP	139,59	144,60	146,01	147,57	151,31

Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022

Komponen Pengeluaran	2018 - 2022 (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,95	2,99	-1,07	1,05	2,77
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,08	0,02	-0,02	0,01	0,02
3. Konsumsi Pemerintah	0,12	0,17	0,01	0,13	-0,07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,09	1,47	-1,88	1,91	0,19
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor					
PDRB / GRDP	5,81	5,64	-0,91	3,74	5,12

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Sukabumi untuk periode 2018 - 2022.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Sukabumi, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Sukabumi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok

COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018 - 2022 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku). Kenaikan jumlah penduduk dan harga menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari sisi nominal. Namun, jika dilihat dari sisi riil (atas dasar harga konstan), PDRB mengalami penurunan pada tahun 2020 kemudian meningkat kembali pada tahun berikutnya.

Selama periode 2018 - 2022 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berfluktuatif, yaitu 65,08 persen (2018); 64,83 persen (2019); 64,92 persen (2020), 64,12 persen (2021); dan 64,32 persen (2022). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 65,08 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 64,12 persen.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB	40.096,23	43.713,67	43.796,96	45.358,29	49.039,08
b. ADHK 2010	27.945,39	29.265,68	28.768,02	29.253,68	30.580,38
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	65,08	64,83	64,92	64,12	64,32
Rata-rata konsumsi per Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB (Ribu Rp)	16.294,69	17.484,71	16.123,61	16.425,38	17.758,29
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	11.356,72	11.705,77	10.590,79	10.593,49	11.073,92
Pertumbuhan⁷					
a. Total konsumsi RT	4,61	4,72	-1,70	1,69	4,54
b. Perkapita	4,30	3,07	-9,53	0,03	4,54
Jumlah penduduk (000 orang)	2.460,69	2.500,11	2.716,33	2.761,48	2.806,66

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018, setiap penduduk di Kabupaten Sukabumi menghabiskan dana sekitar 16.294,69 ribu rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 17.484,71 ribu rupiah (2019); 16.123,61 ribu rupiah (2020); 16.425,38 ribu rupiah (2021); dan 17.758,29 ribu rupiah (2022). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi rumah tangga tumbuh pada kisaran 1,69 persen hingga 4,72 persen, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi ekonomi sebesar 1,70 persen.

Kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berada pada kisaran 4,30 persen tahun 2018 kemudian menjadi 3,07 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -9,53 persen dan di tahun-tahun berikutnya meningkat kembali sebesar 0,03 persen dan 2,85 persen. Hal tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Sukabumi, 2018 – 2022⁸

Kelompok Konsumsi	(%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	49,21	50,19	51,88	52,41	52,11
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,38	7,34	7,10	6,99	6,98
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,60	12,11	12,24	11,89	11,88
d. Kesehatan & Pendidikan	4,62	4,61	4,83	4,89	4,72
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	21,14	20,78	18,94	18,84	19,25
f. Hotel & Restoran	0,98	0,96	0,92	0,91	0,92
g. Lainnya	4,07	4,02	4,09	4,08	4,14
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga di Kabupaten Sukabumi sebesar 4,61 persen (2018); 4,72 persen (2019); -1,70 persen (2020); 1,69 persen (2021); dan 4,54 persen (2022). Sementara itu rata-rata konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun adalah 4,30 persen (2018); 3,07 persen (2019); -9,53 persen (2020); 0,03 persen (2021); dan 2,85 persen (2022). Dari data

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB Atas Dasar Harga berlaku (ADHB)

tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumah tangga cenderung lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 0,29 hingga 1,66 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Kabupaten Sukabumi, 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba/Total of NPISH Consumption					
a. ADHB	327,67	348,71	342,66	353,61	378,12
b. ADHK 2010	231,82	240,65	231,89	236,47	246,75
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50
Pertumbuhan⁹	15,65	3,81	-3,64	1,97	4,35

Total pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba dalam kurun waktu tahun 2018 – 2019 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, namun pada tahun berikutnya mengalami kontraksi ekonomi. Pada tahun 2018 Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

sebesar 327,67 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 348,71 miliar rupiah (2019), 342,66 miliar rupiah (2020), 353,61 miliar rupiah (2021), dan 378,12 miliar rupiah (2022). Pertumbuhan pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba tahun dasar 2010 juga berturut-turut adalah 15,65 persen (2018), 3,81 persen (2019), -3,64 persen (2020), 1,97 persen (2021), dan 4,35 (2022). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 karena adanya kegiatan Pemilihan Presiden.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan

pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 3.596,57 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 3.752,25 miliar rupiah (2019), 3.796,87 miliar rupiah (2020), 3.968,80 miliar rupiah (2021), dan 4.001,03 miliar rupiah (2022). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kecenderungan kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB	3.596,57	3.752,25	3.796,87	3.968,80	4.001,03
b. ADHK 2010	2.261,44	2.338,67	2.341,29	2.400,87	2.366,75
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	5,84	5,57	5,63	5,61	5,25
Rata-rata konsumsi per Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB (Ribu Rp)	1.461,61	1.500,83	1.397,80	1.437,20	1.425,54
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	919,03	935,43	861,93	869,42	843,26
Pertumbuhan¹⁰					
a. Total konsumsi Pemerintah	2,24	3,42	0,11	2,54	-1,42
b. Perkapita	1,94	1,78	-7,86	0,87	-3,01
Jumlah penduduk (000 orang)	2.460,69	2.500,11	2.716,33	2.761,48	2.806,66

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami penurunan, dari 5,84 persen (tahun 2018) hingga mencapai 5,25 persen (tahun 2022). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,25 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2018.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1.461,61 ribu rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 1.500,83 ribu rupiah (2019); kemudian menurun menjadi 1.397,80 ribu rupiah (2020), dan mencapai 1.425,54 ribu rupiah pada tahun 2022.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya fluktuasi, dengan masing-masing senilai 919,03 ribu rupiah (2018); 935,43 ribu rupiah (2019); 861,93 ribu rupiah (2020); 869,42 ribu rupiah (2021); dan 843,26 ribu rupiah (2022). Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,24 persen (2018) menjadi 3,42 persen (2019). Kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita yaitu 0,11 persen (2020); 2,54 persen (2021); dan -1,42 persen (2022).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹¹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2018 - 2022 berfluktuasi dari 7,30 persen (2018) menjadi 0,67 persen (2022), sementara di tahun lainnya masing-masing 5,05 persen (2019); -6,49 persen (2020); dan 7,00 persen (2021). Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2018, hal ini disebabkan oleh dengan dimulainya pembangunan jalan di berbagai desa dengan dana ADD dan jalan-jalan menuju daerah wisata Geopark Ciletuh. Serta pembangunan yang terus berkembang dalam rangka peningkatan sektor wisata, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan.

¹¹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 11. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Pembentukan Modal Tetap Bruto					
a. ADHB	17.869,75	19.345,66	18.159,55	20.347,08	21.272,68
b. ADHK 2010	12.817,01	13.464,78	12.590,38	13.471,70	13.561,34
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	29,00	28,69	26,92	28,76	27,90
Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (Ribu Rp)					
a. Bangunan (Miliar Rp)	15.150,61	16.662,40	15.774,24	17.659,89	18.231,99
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	2.719,14	2.683,26	2.385,31	2.687,19	3.040,69
Pertumbuhan¹²					
a. Bangunan	8,43	6,55	-5,58	6,65	-0,56
b. Non Bangunan	1,16	-3,63	-12,39	9,45	8,97

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Sukabumi, 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Perubahan Inventori					
a. ADHB	3.152,18	3.217,40	1.292,22	-702,07	118,19
b. ADHK 2010	2.033,63	2.039,80	816,59	-416,35	69,87
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	5,12	4,77	1,92	-0,99	0,16

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2018 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 3.152,18 miliar rupiah, yang kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 3.217,40 miliar rupiah. Pada tahun 2020 perubahan inventori menurun menjadi 1.292,22 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2021 penurunan hingga mencapai nilai -702,07 miliar rupiah. Di tahun 2022 perubahan inventori mengalami kenaikan menjadi 118,19 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Sukabumi mengalami kecenderungan penurunan nilai persentase. Pada tahun 2018, proporsi perubahan inventori adalah 5,12 persen, selanjutnya

4,77 persen (2019), 1,92 persen (2020), -0,99 persen (2021), dan 0,16 persen (2022). Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2021.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Sukabumi, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 13. Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Net Ekspor					
a. ADHB	-3.427,62	-2.954,57	73,92	1412,33	1434,56
b. ADHK 2010	-1.148,41	-721,26	1.457,11	2989,26	3563,63
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	-5,56	-4,38	0,11	2,00	1,88

Secara total, dalam kurun waktu 2018 - 2022 nilai net ekspor barang dan jasa menunjukkan keadaan yang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar -3.427,62 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar -2.954,57 miliar rupiah pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 - 2022 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar -73,92 miliar rupiah; 1.412,33 miliar rupiah; dan 1.434,56 miliar rupiah. Selaras dengan nilai net ekspor atas dasar harga berlaku, nilai net ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan kecenderungan kenaikan

dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar -1.148,41 miliar rupiah (2018); -721,26 miliar rupiah (2019); 1.457,11 miliar rupiah (2020); 2.989,26 miliar rupiah (2021); dan 3.563,63 miliar rupiah (2022). Sementara itu, pada periode 2018 sampai dengan 2022, proporsi dalam PDRB cenderung mengalami peningkatan dari -5,56 persen (2018) menjadi 1,88 persen (2022).

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Sukabumi. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Sukabumi di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Sukabumi terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

<https://sukabumikab.bps.go.id>

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB

PENGELUARAN KABUPATEN

SUKABUMI, 2018 - 2022

<https://sukabumikab.bps.go.id>

<https://sukabumikab.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Sukabumi, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

**Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PDRB					
a. ADHB	61.614,78	67.423,12	67.462,17	70.738,04	76.243,67
b. ADHK 2010	44.140,89	46.628,34	46.205,28	47.935,63	50.388,72
Rata-rata PDRB per Kapita (Ribuan Rp)					
a. ADHB (Ribuan Rp)	25.039,61	26.968,08	24.835,83	25.616,03	27.165,23
b. ADHK 2010 (Ribuan Rp)	17.938,40	18.650,53	17.010,22	17.358,70	17.953,24
Pertumbuhan¹³					
a. Total PDRB	5,81	5,64	-0,91	3,74	5,12
b. Perkapita	5,50	3,97	-8,79	2,05	3,43
Jumlah penduduk (000 orang)	2.460,69	2.500,11	2.716,33	2.761,48	2.806,66
Pertumbuhan	0,29	1,60	NA	1,66	1,64

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

**Tabel 15. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Sukabumi, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
a. Rumah Tangga (Miliar Rp)	40.096,23	43.713,67	43.796,96	45.358,29	49.039,08
b. LNPRT (Miliar Rp)	327,67	348,71	342,66	353,61	378,12
c. Pemerintah	3.596,57	3.752,25	3.796,87	3.968,80	4.001,03
Jumlah	44.020,48	47.814,63	47.936,49	49.680,70	53.418,23
PDRB (ADHB)	61.614,78	67.423,12	67.462,17	70.738,04	76.243,67
Proporsi	71,44	70,92	71,06	70,23	70,06

<https://sukabumikab.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP

<https://sukabumikab.bps.go.id>

<https://sukabumikab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Sukabumi pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2018 sampai dengan 2022, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling

berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Sukabumi terhadap ekonomi luar daerah.

LAMPIRAN

<https://sukabumikab.bps.go.id>

<https://sukabumikab.bps.go.id>

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022

(Miliar Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019 ^R	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	40.096,23	43.713,67	43.796,96	45.358,29	49.039,08
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	19.730,24	21.939,55	22.720,67	23.772,58	25.552,98
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2.958,76	3.209,42	3.108,00	3.168,28	3.422,93
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5.052,13	5.292,26	5.360,91	5.393,36	5.826,26
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.852,96	2.013,41	2.114,99	2.215,88	2.313,81
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	8.477,45	9.084,30	8.297,29	8.544,41	9.440,74
1.f. Hotel dan Restoran	391,45	418,95	403,92	413,96	453,28
1.g. Lainnya	1.633,24	1.755,78	1.791,18	1.849,83	2.029,10
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	327,67	348,71	342,66	353,61	378,12
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.596,57	3.752,25	3.796,87	3.968,80	4.001,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	17.869,75	19.345,66	18.159,55	20.347,08	21.272,68
4.a. Bangunan	15.150,61	16.662,40	15.774,24	17.659,89	18.231,99
4.b. Non Bangunan	2.719,14	2.683,26	2.385,31	2.687,19	3.040,69
5. Perubahan Inventori	3.152,18	3.217,40	1.292,22	-702,07	118,19
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-3.427,62	-2.954,57	73,92	1.412,33	1.434,56
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	61.614,78	67.423,12	67.462,17	70.738,04	76.243,67

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 – 2022

(Miliar Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019^R	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	27.945,39	29.265,68	28.768,02	29.253,68	30.580,38
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	12.183,82	12.963,21	13.216,09	13.545,51	14.114,58
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2.440,81	2.510,40	2.347,43	2.364,67	2.474,36
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.770,95	3.857,78	3.856,12	3.844,34	3.997,25
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.405,13	1.462,15	1.490,70	1.559,41	1.594,36
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	6.617,10	6.894,03	6.329,88	6.398,08	6.777,88
1.f. Hotel dan Restoran	321,73	337,18	317,80	320,08	341,61
1.g. Lainnya	1.205,86	1.240,93	1.210,00	1.221,58	1.280,33
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	231,82	240,65	231,89	236,47	246,75
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.261,44	2.338,67	2.341,29	2.400,87	2.366,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	12.817,01	13.464,78	12.590,38	13.471,70	13.561,34
4.a. Bangunan	10.935,41	11.651,52	11.001,72	11.732,90	11.666,66
4.b. Non Bangunan	1.881,60	1.813,26	1.588,65	1.738,80	1.894,68
5. Perubahan Inventori	2.033,63	2.039,80	816,59	-416,35	69,87
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-1.148,41	-721,26	1.457,11	2.989,26	3.563,63
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	44.140,89	46.628,34	46.205,28	47.935,63	50.388,72

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 – 2022

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019 ^R	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	65,08	64,83	64,92	64,12	64,32
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	32,02	32,54	33,68	33,61	33,51
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,80	4,76	4,61	4,48	4,49
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,20	7,85	7,95	7,62	7,64
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,01	2,99	3,14	3,13	3,03
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	13,76	13,47	12,30	12,08	12,38
1.f. Hotel dan Restoran	0,64	0,62	0,60	0,59	0,59
1.g. Lainnya	2,65	2,60	2,66	2,62	2,66
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,84	5,57	5,63	5,61	5,25
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,00	28,69	26,92	28,76	27,90
4.a. Bangunan	24,59	24,71	23,38	24,97	23,91
4.b. Non Bangunan	4,41	3,98	3,54	3,80	3,99
5. Perubahan Inventori	5,12	4,77	1,92	-0,99	0,16
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-5,56	-4,38	0,11	2,00	1,88
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 – 2022

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019 ^R	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	63,31	62,76	62,26	61,03	60,69
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	27,60	27,80	28,60	28,26	28,01
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,53	5,38	5,08	4,93	4,91
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,54	8,27	8,35	8,02	7,93
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,18	3,14	3,23	3,25	3,16
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	14,99	14,79	13,70	13,35	13,45
1.f. Hotel dan Restoran	0,73	0,72	0,69	0,67	0,68
1.g. Lainnya	2,73	2,66	2,62	2,55	2,54
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,53	0,52	0,50	0,49	0,49
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,12	5,02	5,07	5,01	4,70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,04	28,88	27,25	28,10	26,91
4.a. Bangunan	24,77	24,99	23,81	24,48	23,15
4.b. Non Bangunan	4,26	3,89	3,44	3,63	3,76
5. Perubahan Inventori	4,61	4,37	1,77	-0,87	0,14
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-2,60	-1,55	3,15	6,24	7,07
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 -2022

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019 ^R	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	8,96	9,02	0,19	3,56	8,11
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	10,05	11,20	3,56	4,63	7,49
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	9,24	8,47	-3,16	1,94	8,04
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,72	4,75	1,30	0,61	8,03
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8,49	8,66	5,05	4,77	4,42
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	9,04	7,16	-8,66	2,98	10,49
1.f. Hotel dan Restoran	9,59	7,02	-3,59	2,48	9,50
1.g. Lainnya	5,79	7,50	2,02	3,27	9,69
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	22,44	6,42	-1,74	3,20	6,93
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,94	4,33	1,19	4,53	0,81
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,49	8,26	-6,13	12,05	4,55
4.a. Bangunan	11,53	9,98	-5,33	11,95	3,24
4.b. Non Bangunan	5,02	-1,32	-11,10	12,66	13,16
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	10,02	9,43	0,06	4,86	7,78

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, 2018 – 2022

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019 ^R	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,61	4,72	-1,70	1,69	4,54
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,03	6,40	1,95	2,49	4,20
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,96	2,85	-6,49	0,73	4,64
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,64	2,30	-0,04	-0,31	3,98
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,65	4,06	1,95	4,61	2,24
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	5,42	4,19	-8,18	1,08	5,94
1.f. Hotel dan Restoran	4,31	4,80	-5,75	0,72	6,73
1.g. Lainnya	1,57	2,91	-2,49	0,96	4,81
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	15,65	3,81	-3,64	1,97	4,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,24	3,42	0,11	2,54	-1,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,30	5,05	-6,49	7,00	0,67
4.a. Bangunan	8,43	6,55	-5,58	6,65	-0,56
4.b. Non Bangunan	1,16	-3,63	-12,39	9,45	8,97
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5,81	5,64	-0,91	3,74	5,12

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional
Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019^R	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	199,67	217,69	218,10	225,88	244,20
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	227,72	253,22	262,23	274,37	294,92
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	178,02	193,11	187,00	190,63	205,95
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	173,44	181,68	184,04	185,16	200,02
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	171,36	186,20	195,60	204,93	213,98
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	181,58	194,58	177,73	183,02	202,22
1.f. Hotel dan Restoran	176,24	188,62	181,85	186,37	204,07
1.g. Lainnya	187,75	201,84	205,91	212,65	233,26
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	250,20	266,26	261,64	270,01	288,72
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	190,28	198,52	200,88	209,98	211,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	220,23	238,42	223,80	250,76	262,17
4.a. Bangunan	234,08	257,44	243,71	272,85	281,69
4.b. Non Bangunan	165,63	163,44	145,30	163,68	185,22
5. Perubahan Inventori	190,27	194,21	78,00	-42,38	7,13
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	104,74	90,29	-2,26	-43,16	-43,84
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	215,43	235,74	235,88	247,33	266,58

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional
Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019^R	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	139,16	145,74	143,26	145,68	152,28
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	140,62	149,62	152,53	156,34	162,90
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	146,86	151,05	141,24	142,28	148,88
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	129,46	132,44	132,38	131,98	137,23
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	129,95	135,22	137,86	144,22	147,45
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	141,74	147,67	135,58	137,05	145,18
1.f. Hotel dan Restoran	144,85	151,80	143,08	144,10	153,80
1.g. Lainnya	138,62	142,65	139,10	140,43	147,18
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	177,01	183,75	177,06	180,56	188,41
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	119,65	123,73	123,87	127,02	125,22
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	157,96	165,94	155,17	166,03	167,13
4.a. Bangunan	168,95	180,02	169,98	181,27	180,25
4.b. Non Bangunan	114,61	110,45	96,77	105,91	115,41
5. Perubahan Inventori	122,75	123,13	49,29	-25,13	4,22
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	35,09	22,04	-44,53	-91,35	-108,90
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	154,34	163,03	161,55	167,60	176,18

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 9. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019^R	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	143,48	149,37	152,24	155,05	160,36
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	161,94	169,24	171,92	175,50	181,04
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	121,22	127,85	132,40	133,98	138,34
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	133,98	137,18	139,02	140,29	145,76
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	131,87	137,70	141,88	142,10	145,12
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	128,11	131,77	131,08	133,55	139,29
1.f. Hotel dan Restoran	121,67	124,25	127,10	129,33	132,69
1.g. Lainnya	135,44	141,49	148,03	151,43	158,48
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	141,35	144,90	147,77	149,54	153,24
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	159,04	160,44	162,17	165,31	169,05
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	139,42	143,68	144,23	151,04	156,86
4.a. Bangunan	138,55	143,01	143,38	150,52	156,27
4.b. Non Bangunan	144,51	147,98	150,15	154,54	160,49
5. Perubahan Inventori	155,00	157,73	158,25	168,63	169,16
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	298,47	409,64	5,07	47,25	40,26
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	139,59	144,60	146,01	147,57	151,31

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2018 - 2022

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019^R	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,16	4,10	1,92	1,85	3,42
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,78	4,51	1,58	2,09	3,16
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,08	5,46	3,56	1,20	3,25
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,01	2,40	1,34	0,91	3,89
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,67	4,42	3,03	0,15	2,13
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	3,44	2,85	-0,52	1,88	4,30
1.f. Hotel dan Restoran	5,06	2,12	2,29	1,76	2,60
1.g. Lainnya	4,15	4,46	4,62	2,29	4,66
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	5,87	2,51	1,98	1,20	2,48
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,64	0,88	1,08	1,93	2,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,98	3,05	0,39	4,72	3,86
4.a. Bangunan	2,86	3,22	0,26	4,98	3,83
4.b. Non Bangunan	3,82	2,40	1,46	2,93	3,85
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3,98	3,59	0,97	1,07	2,54

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

<https://sukabumikab.bps.go.id>

<https://sukabumikab.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

<https://sukabumikab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUKABUMI**

BPS-Statistics of Sukabumi Regency

Jalan Raya Karangtengah KM.14 No.52 Cibadak, Sukabumi
Telp: (0266) 536953 <https://sukabumikab.bps.go.id>
E-mail : bps3202@bps.go.id